



DpmpD
Kaltim

BULETIN EDISI 1 TAHUN 2020

KABAR DESA

SAJIKAN KABAR TERKINI TENTANG DESA
DI KALIMANTAN TIMUR



BONUS :
Leaflet Covid 19

Berita Utama :

**Secara Prinsip, Gubernur Setuju
Berikan Bankeu Untuk Desa**

**Jauhar: Mari Terus Lanjutkan
Kinerja Baik**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT, saat ini telah terbit buletin yaitu KABAR DESA, Sajikan Seluk Beluk Kabar Tentang Desa.



MOH. JAUHAR EFENDI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA PROV. KALTIM

Kami mengharapkan melalui buletin ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan informasi dan komunikasi dengan seluruh Penggiat Desa dimanapun berada, khususnya untuk 841 Desa di Kalimantan Timur, sekaligus sebagai sarana komunikasi atau media untuk mendukung Penyebaran Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Dewan redaksi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pegawai DPMPD Prov. Kaltim atas kontribusi yang besar sehingga buletin ini dapat terbit 3 bulan sekali

.Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penulis yang telah berpartisipasi memberi kontribusi berupa berita yang termuat di www.dpmpd.kaltimprov.go.id

Akhir kata sebagai harapan kami, artikel dalam Buletin ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca dan segala kritik maupun saran untuk pengembangan dan kesempurnaan Buletin ini.

DAFTAR ISI



VOL.1

2020

DPMPD Lakukan Kunjungan Lapangan Bina Posyandu Anyelir Road To Lomba Posyandu Nasional

HAL 1

lima Penghargaan Bidang PMPD Di anugerahkan di Malam Kaltim Award 2020

HAL 2

Secara Prinsip, Gubernur Setuju Berikan Bantuan Keuangan Desa

HAL 4

432 TPP Kaltim Tanda Tangan Kontrak Secara Serentak

HAL 5

Jauhar : Mari Terus Lanjutkan Kinerja Terbaik

HAL 6

DPMPD Coba Susun Pedoman Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan LKD/ LKA

HAL 7

DPMPD Mantapkan Target Desa Sasaran Peningkatan Status IDM 2020

HAL 8

Kepala Desa Diingatkan Perhatikan Arahan Mendes PDTT Terkait Pengelolaan DD

HAL 10

Kunjungi Sekretariat P3MD Kubar, Jauhar Diskusi Pengembangan Desa

HAL 11

Rakortek Pengelolaan Keuangan Desa Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes

HAL 12

Rakor Ajang Tetapkan dan Sepakati Target 30 Desa Sasaran 2021

HAL 13

Pengelolaan Bumdes Paser Sarankan Provinsi Dorong Desa Alokasikan Proporsional Untuk Permodalan Bumdes

HAL 15

Provinsi Kalimantan Timur masih "Merah" dalam Pengelolaan SP4N Lapor

HAL 16

Jauhar Sebut Pemporv. Kaltim Laksanakan Kewajiban Memastikan Warga Kaltim Aman Hadapi Kasus Corona

HAL 17

Gubernur Isran Harap Percepatan DD Bisa diwujudkan di Kaltim

HAL 23

BBPB Binuang - DPMPD Kaltim teken MoU Kerjasama Pemberdayaan masyarakat Bidang Pertanian

HAL 25

Penting Kaderisasi Masyarakat Desa jadi KPMD

HAL 26

Jauhar : usai dilantik Harus Amanah Dalam Jabatannya

HAL 28

Melalui siaran TVRI, jauhar Minta DD Fokus untuk Pemberdayaan masyarakat Desa

HAL 29

Kaltim Coba Yakinkan Pentingnya Keberpihakan Pusat

HAL 31

DPMPD Berguru Masalah MHA di Bali

HAL 33

Bakal di Realisasi, Rencana Program Pemasangan Internet Desa

HAL 34

DPMPD Lihat Potensi Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Penajam

HAL 36

DPMPD Batalkan 2 Kegiatan libatkan Mas

HAL 34

LEAFLET
COVID 19
HAL 19 - 22



25 DESA

SASARAN RPJMD DPMPD 2020

HAL. 9

Seluruh Isi Buletin ini juga termuat di website Resmi DPMPD Kaltim

www.dpmpd.kaltimprov.go.id

DPMPD LAKUKAN KUNJUNGAN LAPANGAN BINA POSYANDU ANYELIR ROAD TO LOMBA POSYANDU NASIONAL



SAMARINDA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melalui Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat melakukan kunjungan lapangan ke Posyandu Anyelir, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Jumat (3/1).

Kunjungan dalam rangka peran pembinaan menghantarkan Posyandu Anyelir mewakili Kaltim road to atau menuju Lomba Posyandu tingkat nasional.

"Posyandu Anyelir akan mewakili Provinsi Kaltim dalam Lomba Posyandu tingkat Nasional kategori kota. Posyandu Anyelir merupakan juara 1 Lomba Posyandu tingkat Provinsi Kaltim kategori kota dan berhak mewakili Kaltim tingkat nasional," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Isnaini Trikorawati yang memimpin rombongan kunjungan lapangan.

Tim utamanya melakukan kunjungan lapangan untuk melihat tanaman toga serta kolam pemancingan dan areal khusus merokok yang menjadi program unggulan Posyandu Anyelir.

Diantaranya kolam pemancingan. Itu merupakan inovasi dari posyandu yang sengaja menyiapkan areal khusus untuk perokok. Mengingat salah satu RT di wilayah tersebut memiliki aturan tidak boleh merokok di dalam rumah sehingga disiapkan lokasi di luar untuk merokok.

"Kolam pemancingan ini salah satu yang kita kunjungi. Inovasinya dianggap laik dijual di kancan nasional. Semoga kita bisa juara lomba posyandu nasional," sebutnya.

Isnaini sendiri melakukan pembinaan posyandu didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Evida Prasintaningrum, Kasi Ketahanan dan Sosbudmasy, Huzaimah, dan Bendera TP PKK Kaltim, Abdi Gumbira. Ada juga Lurah Mugirejo, Kader Posyandu Anyelir serta dari TP PKK Samarinda.(DPMPD Kaltim/abdi/arf)

LIMA PENGHARGAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DIANUGRAHKAN DI MALAM KALTIM AWARD 2020



SAMARINDA -- Pemprov Kaltim juga menyerahkan penghargaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bagi kabupaten/kota se Kaltim pada Malam Kaltim Award 2020 dan Syukuran HUT ke 63 Pemprov Kaltim, di Gedung Planery Hall Convention Hall Samarinda, Kamis (9/1).

Terdapat lima penghargaan yang diserahkan kepada para jawara lomba tingkat Provinsi Kaltim yang tropi dan sertifikat penghargaannya diserahkan kepada pemenang oleh Plt Sekprov Kaltim, M Sabani.

Penghargaan yang diberikan mulai dari lomba bulan bhakti gotong royong masyarakat kategori kelurahan yang diraih Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan juara I dan Kelurahan Beras Basah, Bontang juara II.

Penghargaan lomba bulan bhakti gotong royong masyarakat kategori desa/kampung diraih Kampung Sumber Sari, Kutai Barat juara I, Desa Paser Belengkong, Paser juara II, dan Kampung Sukan Tengah, Berau juara III.

Selanjutnya lomba desa/kampung yang diraih Kampung Batu Putih, Berau juara I, Kampung Telemow, Penajam Paser Utara juara II, dan Kampung Penawai, Kutai Barat juara III.

Lomba kelurahan diraih Kelurahan Teritip, Balikpapan juara I, Kelurahan Brebes Tengah, Bontang juara II, dan Kelurahan Mugirejo, Samarinda juara III.

Terakhir lomba cerdas cermat diraih Kabupaten Penajam Paser Utara juara I, Kabupaten Paser juara II, serta Kabupaten Kutai Timur juara III.

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi bahwa lima penghargaan tersebut merupakan hasil lomba yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019.

"Ini memang agenda tahunan kita. Lomba urusan bidang DPMPD yang sebagai persiapan lomba tingkat nasional dan menyongsong peringatan HUT Pemnprov Kaltim setiap tabunnya," ujar Jauhar yang juga Ketua Panitia HUT ke 63 Pemprov Kaltim didampingi istri saat menghadiri Malam Anugrah Kaltim Award 2020 dan Syukuran HUT ke 63 Pemprov Kaltim.

Sedang piagam penghargaan dan trophy memang diserahkan saat HUT Pemprov Kaltim sebagai bagian penghargaan keberhasilan pembangunan.

"Penghargaan bukan utama, terpenting bagaimana penguasaan terhadap urusan bidang DPMPD ini. Tapi dengan penghargaan menjadi penyemangat dan motivasi peraih penghargaan maupun yang lain agar semakin baik lagi," katanya.

Nampak hadir mantan petinggi Kaltim mulai dari Gubernur Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Awang Faroek Ishak, Wakil Gubernur Yurnalis Ngayoh, Wakil Gubernur Farid Wadjdy, dan Sekprov Saiful Teteng, kemudian Forkopinda Kaltim, serta kepala dan jajaran Perangkat Daerah Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)

Pada kesempatan itu, Jauhar juga didaulat menyerahkan penghargaan lingkup bidang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yakni perusahaan taat pajak 2019 dan perusahaan pemungut PBBKB 2019.

Bersamaan itu juga diserahkan berbagai penghargaan lain yang secara bergantian diserahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov Kaltim, Abu Helmi, Asisten Administrasi Umum, Fathul Halim, Plt Sekprov Kaltim, M Sabani, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dan Gubernur Kaltim, Isran Noor sebagai pamungkas.

Diakhir acara Gedung Semangka sebutan Gedung Planery Hall oleh Gubernur Isran ini diguncang oleh penampilan apik artis Band Ibu Kota Ungu.

Meskipun tidak dengan personel lengkap hanya Enda dan Onci, penampilan Ungu memukau dan menjadi magnet pengunjung untuk ikut bernyanyi dan mengabadikan momen.

Secara Prinsip, Gubernur Setuju Berikan Bantuan Keuangan Desa

SAMARINDA -- Niatan memberikan bantuan keuangan desa dari Pemprov Kaltim menunjukan titik terang. Usulan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta bagi 841 desa se Kaltim tersebut mendapat respon positif Gubernur Kaltim dengan catatan harus sesuai ketentuan dan berbeda dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

"Prinsip, Pak Gubernur Kaltim Isran Noor setuju. Hanya saja kita diingatkan agar pemberian bantuan keuangan desa tersebut beda dengan uang-uang lain yang masuk ke desa agar termanfaatkan optimal," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPTD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Selasa (14/1).

Menurutnya catatan tersebut penting karena seiring terbitnya UU No6/2014 tentang desa menempatkan desa berhak memperoleh dana dari beberapa sumber, sehingga perlu pengaturan agar tidak tumpang tindih.

Menurut UU Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bila memungkinkan, Jauhar berharap bantuan keuangan desa dari provinsi tersebut bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021.

Jika dianggarkan setiap desa diberi bantuan keuangan sebesar Rp100 juta, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp84,1 milyar untuk mengakomodir 841 desa se Kaltim.



"Semoga bisa segera direalisasikan. Selain membantu desa mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan desa, juga menempatkan Pemprov Kaltim menjadi provinsi yang melaksanakan amanah UU memberikan perhatian bagi desa," harapnya

432 TPP Kaltim Tandatangani Kontrak Secara Serentak

SANGATTA -- Sebanyak 432 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kaltim menandatangani kontrak kerja secara serentak, di 7 kabupaten se Kaltim, Senin (20/1).

Mereka yang melakukan penandatanganan kontrak akan mulai melaksanakan tugas pendampingan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di lokasi pendampingan masing-masing.

Khusus Kabupaten Kutai Timur, tercatat sebanyak 75 TPP dari 78 TPP yang ada melaksanakan penandatanganan kontrak, di Kantor Bupati Kutai Timur, Senin (20/1) sekitar pukul 09.00 Wita.

Penandatanganan disaksikan Bupati Kutai Timur Ismunandar, Kepala DPMPD Kaltim Moh Jauhar Efendi, Sekkab Kutai Timur Irawansyah, Asisten I Sekkab Kutai Timur Suko Buono, Asisten II Sekkab Kutai Timur Suroto, Kepala DPMD Kutai Timur Suwandi, serta PPK Isnawati dan PPBJ DPMPD Kaltim Noor Agustina.

Bupati Ismunandar dalam arahannya mengingatkan TPP yang menandatangani kontrak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

"Yang diberikan amanah pintar-pintar di desa. Membantu membangun desa di Kabupaten Kutai Timur semakin baik lagi,"katanya.



Hanya saja, dia menilai TPP perlu mendapat perhatian dari Pemkab Kutai Timur untuk tambahan biasa operasional berupa biaya transportasi. Kondisinya standar yang ditetapkan pusat untuk standar Pulau Jawa.

Sementara geografis Kabupaten Kutai Timur terbilang luas dengan akses jalan terbilang sulit dijangkau dan berjauhan, sehingga tidak memadai dana operasional yang ditetapkan APBN. Perlu didukung tambahan operasional dari APBD Kutai Timur.

"Yang penting bantulah di desa. Berikan masukan. Jangan jadi propokator. Kalau ada masalah sampaikan untuk segera diselesaikan bersama,"katanya.

Untuk diketahui, 75 orang TPP Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan tandatangan kontrak terdiri dari 4 orang Tenaga Ahli (TA), 20 orang Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), 15 orang Pendamping Teknik Infrastruktur, dan 36 orang Pendamping Lokal Desa (PLD).

Sedangkan 432 TPP se Kaltim yang akan melaksanakan penandatanganan kontrak kerja terdiri dari 36 TA, 115 PDP, 68 PDTI, dan 213 PLD.(DPMPD Kaltim/arf)

Jauhar : Mari Terus Tunjukkan Kinerja Terbaik

SAMARINDA – Kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV sesuai arahan Presiden Joko Widodo diisyaratkan belum diberlakukan secara efektif di daerah. Pemprov Kaltim diisyaratkan bakal tetap memfungsikan serta melakukan pengisian kekosongan pejabat eselon III dan IV lingkup Kaltim.



“Mari terus tunjukkan kinerja terbaik agar kita bisa merebut peluang. Insya ALLAH gubernur memandang masih dibutuhkan. Selama belum ada aturan yang tegas maka pemprov tetap mengagendakan mengisi yang kosong,

UJAR KEPALA DPMPD PROV. KALTIM
MOH. JAUHAR EFENDI

Menurutnya, jika secara fungsi pejabat eselon III dan IV masih dibutuhkan maka akan dilakukan pengisian terhadap jabatan lowong. Artinya akan ada mutasi promosi dan mutasi horizontal untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berkaitan itu, segenap jajaran DPMPD harus menunjukan kinerja terbaik agar dianggap laik menduduki jabatan tertentu. “Tidak lupa berdoa karena ikhtiar saja tidak cukup tanpa doa,” katanya.

Dia juga mengingatkan pentingnya segenap jajarannya untuk segera mengeksekusi program kegiatan yang sudah direncanakan agar terlaksana sesuai target. Perlu dipertimbangkan waktu pelaksanaannya menyesuaikan jadwal puasa maupun Hari Raya Idul Fitri.(DPMPD Kaltim/arf)

DPMPD Coba Susun Pedoman Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan LKD/LKA

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Kaltim disebut bakal mencoba menyusun pedoman kebijakan pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Adat (LKD/LKA).

Ini sebagai upaya pembinaan LKD/LKA agar perannya mendukung kinerja kepala desa maupun lurah melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa/kelurahan semakin optimal.

“Sebagai langkah awal kita akan turun lapangan menginventarisasi dan verifikasi LKD/LKA. Konsep pendataannya sudah kita siapkan dan dibahas bersama tim yang memang pakarnya,” ujar Kepala DPMPD Kaltim melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Isnaini Trikorawati, saat rapat membahas program kelembagaan, di Kantor DPMPD Kaltim, Kamis (23/1).

Menurutnya formulir yang disiapkan berisi informasi secara lengkap mengenai keberadaan LKD/LKA, yakni RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Memastikan lembaga kemasyarakatan terbentuk atau ada ada di setiap desa/kelurahan.

Kemudian juga harus didukung ketersediaan data pendukungnya, diantaranya terkait RT menyangkut jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas umum seperti pasar maupun poskamling maupun untuk PKK misalnya terkait SK kepengurusannya.

Data yang dihimpun bisa menjadi dasar Pemprov Kaltim memberikan pelatihan peningkatan kapasitasnya. “Kader PKK misalnya, dengan SK kita bisa tahu mana yang kepengurusannya akan berakhir maka itu yang akan disasar diberikan peningkatan kapasitas selanjutnya setelah dilantik,” jelasnya

Dia menilai penting meningkatkan kapasitas LKD/LKA karena sesuai amanat UU keberadaannya menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan masyarakat maupun dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

Rapat selain diikuti jajaran DPMPD Kaltim juga menghadirkan konsultan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Musa Ibrahim dan Sarno, serta Ketua DPD LPM Kaltim, Mujarni.(DPMPD Kaltim/arf)



DPMPD Mantapkan Target Desa Sasaran Peningkatan Status IDM 2020

SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengumpulkan segenap pejabat struktural dan Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Kaltim untuk membahas pencapaian target pengentasan desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal.

Mereka rapat koordinasi teknis untuk memantapkan target desa yang menjadi sasaran peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang.

"Ini penting kita bahas karena ada pergeseran. Sebagian desa yang ditargetkan ditingkatkan statusnya pada 2020 sudah meningkat menjadi berkembang. Makanya perlu kita bahas bersama desa mana yang tepat disasar ditingkatkan status IDM nya," ujar Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memimpin rapat, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Senin (3/2).

Selain itu, melalui rapat koordinasi teknis diharap terakomodir data indikator penilaian IDM yang akan disasar ditingkatkan melalui program yang ditetapkan.

Jauhar juga berharap dukungan data KPW melakukan pemetaan perindikator.

"Yakin kalau dicermati satu-satu indikatornya akan cepat pencapaiannya. Desa sasaran kita genjot dengan program yang tepat pada nilai yang masih rendah untuk ditingkatkan," katanya.



Sependapat dengan itu, Tim Leader KPW Kaltim, Alwani menyebut desa yang akan ditetapkan sebagai sasaran betul-betul dianalisis terkait pencapaian indikator yang masih rendah untuk ditingkatkan. "Dan tentunya desa mana yang bisa disasar," katanya.

Sejalan dengan itu, dia mengaku KPW sudah berkoordinasi dengan kepala desa untuk melakukan profiling dan analisis indikator yang dianggap masih rendah.

"Data kita yang mengusulkan desa tertinggal menjadi berkembang Paser mengusulkan 4 desa, Kukar 6 desa, Berau 6 desa, Kubar 34 desa, dan Kutim 4 desa,"sebutnya.

Sementara PPU mengusulkan peningkatan status 4 desa berkembang menjadi maju dan Mahulu belum mengusulkan.

Data ini nantinya akan dipetakan menyesuaikan target DPMPD 2020 sebanyak 25 desa tertinggal menjadi berkembang.

Untuk diketahui Pemprov Kaltim dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 dan Renstra DPMPD 2019 - 2023 menetapkan mengurangi 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang. Rinciannya 15 desa 2019, 25 desa 2020, 30 desa 2021, 35 desa 2022, dan 45 desa 2023.(DPMPD Kaltim/arf)

25 Desa target RPJMD DPMPD Kaltim Tahun 2020 untuk ditingkatkan status IDM

**KAB. KUTAI
KARTANEGARA**

5 Desa

KAB. KUTAI BARAT

4 Desa

KAB. KUTAI TIMUR

3 Desa

KAB. MAHAKAM ULU

4 Desa

KAB. BERAU

4 Desa

KAB. PASER

4 Desa

KALIMANTAN
TIMUR

Kepala Desa Diingatkan Perhatikan Arahan Mendes PDTT Terkait Pengelolaan DD

SAMARINDA -- Sebanyak 841 kepala desa se Kaltim diingatkan memperhatikan arahan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bagi kepala desa dan masyarakat desa terkait pengelolaan Dana Desa (DD).

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi, hal tersebut dianggap penting agar pengelolaan DD lebih efektif dan efisien serta terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan.

"Ada beberapa pesan penting disampaikan pak menteri, diantaranya DD harus dikelola dengan baik. Duitnya jangan dikorupsi tapi dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya untuk Padat Karya Tunai (PKT) supaya perekonomian desa tertangani dengan baik dan ekonomi desa menggeliat," sebut Jauhar menguraikan arahan Mendes PDTT, Selasa (4/2).

Supaya pengelolaan DD efektif dan efisien serta terhindar dari penyalahgunaan, Mendes PDTT sudah mewanti desa-desa yang sudah terhubung jaringan telekomunikasi agar melakukan transaksi keuangan secara non tunai melalui aplikasi perbankan.

Kemudian pihak terkait yang akan mendapat saluran DD juga diminta harus memiliki rekening bank.

"Yang belum punya rekening bank, tapi misalnya kebutuhan ikut bekerja PKT suruh buka rekening sebelum dana disalurkan," papar Jauhar meneruskan arahan Mendes PDTT.



Terkait arahan tersebut, Jauhar menilai hal tersebut positif karena meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan DD. Kemudian proses pencairannya akan lebih cepat karena dilakukan secara elektronik

Akan tetapi bagi desa yang tidak memiliki signal, terpaksa tetap diproses seperti biasa. Karena tidak semua daerah di Kaltim sudah terhubung jaringan telekomunikasi.(DPMPD Kaltim/arf)

Kunjungi Sekretariat P3MD Kubar, Jauhar Diskusi Pengembangan Desa

Di sekretariat, mereka berdiskusi bersama para TA Kubar yang sempat ketemu, yakni Dinda Indah Warastuti, Agung Wibowo, Roy, serta operator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kubar, Dinda Dewi dan Wafik.



KUBAR -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengunjungi Sekretariat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Selasa (4/2).

Kunjungannya tersebut memanfaatkan waktu sembari melaksanakan tugas sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim mewakili Plt Sekprov Kaltim membuka Rakor Badan Kesbangpol se Kaltim yang dilaksanakan, di Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Selasa (4/2) malam ini.

"Karena masih banyak waktu, maka saya manfaatkan posisi saya selaku Kepala DPMPD Kaltim untuk silaturahmi kepada para Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Kubar, sekaligus berkunjung ke Sekretariat P3MD," ujar Jauhar.

Tema diskusi tidak jauh masalah pengembangan desa, bagaimana meningkatkan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang mulai menggeliat di Kubar.

Berdasarkan laporan dari TA Kubar Agung Wibowo, ada dua BUMKam yang sudah mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yaitu BUMKam di Kampung Juaq Asa dan BUMKam di Kampung Sumber Sari.

"Saya berjanji besok (5/2) akan melihat secara langsung aktifitas BUMKam Juaq Asa. Usaha utamanya adalah di sektor pariwisata," katanya.

Dia juga sempat bertemu dengan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang bertugas di Kecamatan Long Iram, Hariyati alias Aulia Angel.

Rakortek Pengelolaan Keuangan Desa Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes



BALIKPAPAN -- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim diakui merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Provinsi.

Ini sesuai amanat Pasal 114 UU No6/2014 tentang Desa yaitu memberikan fasilitasi dan meningkatkan wawasan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

“Melalui kegiatan ini kita juga ingin mensinergikan pelaksanaan program pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat membuka Rakortek Pengelolaan Keuangan Desa, di Balikpapan, Selasa (11/2).

Melalui kegiatan ini dia juga berharap terwujud sinergitas para pembina keuangan desa baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan; serta desa sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Termasuk persamaan persepsi terkait peraturan perundang-undangan terkait yang baru.

Selain itu diharapkan kegiatan ini menjadi ajang tukar pendapat ide-ide yang membangun dan ditemukan strategi baru untuk pemecahan masalah pengelolaan keuangan Desa.

Ditambahkan Ketua Panitia Noor Fathoni, selain rakortek pengelolaan keuangan desa se Kaltim, secara bersamaan juga dilaksanakan rapat kerja teknis (rakerter) bidang pemerintahan desa dan kelurahan tahun 2020. Kedua kegiatan dilaksanakan secara marathon mulai 11 sampai 12 Februari.

“Peserta rakortek pengelolaan keuangan desa se Kaltim terdiri dari kepala/sekretaris/kabid/kasi yang menangani pemberdayaan masyarakat desa kampung terkait pengelolaan keuangan desa. Dan kepala/sekretaris/kabid/kasi/staf yang menangani penyuluhan keuangan desa di BPKAD atau sebutan lain, serta camat terpilih dari 7 kabupaten, kepala desa/kampung dari 7 Kabupaten,” sebutnya.

Sedangkan peserta rakortek pemerintah desa dan kelurahan terdiri dari kabag/kabid/staf yang menangani urusan penyelenggaraan pemerintahan desa kampung dan kelurahan. Kemudian kabag/kabid kesubag/kasi yang menangani urusan perlombaan desa kampung dan kelurahan.(DPMPD Kaltim/arf)

Rakor Ajang Tetapkan dan Sepakati Target 30 Desa Sasaran 2021

BALIKPAPAN -- Tujuan utama pelaksanaan rakor bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 2020 diakui sebagai ajang menetapkan dan menyepakati target 30 desa sasaran yang akan ditingkatkan statusnya menjadi berkembang pada 2021.

"Salah satu tujuan kita berkumpul disini menetapkan desa-desa yang akan ditetapkan menjadi target sasaran peningkatan status desanya dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang," sebut Ketua Panitia Rakor DPMPD Kaltim 2020, Surono, di Balikpapan, Senin (10/2).

Dia menilai tepat disepakati dan ditetapkan desa yang menjadi target agar sasaran programnya jelas. Menyasar desa-desa dimaksud agar fokus mendorong memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada indikator-indikator penilaian IDM yang akan didongkrak.

Menurutnya, DPMPD diberikan peranan untuk meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan melalui penetapan target IDM 150 Desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang.

Target tersebut diwujudkan melalui 4 program prioritas, yaitu program pembangunan lembaga ekonomi perdesaan, program pembangunan desa dan kawasan, program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, serta program kampung iklim target 150 desa.

Kemudian dijabarkan selama lima tahun kedepan yang mulai dari 2019 menyasar 15 desa, 2020 25 Desa, 2021 30 desa, 2022 35 desa, dan 2023 45 desa.

"Dengan pelaksanaan rakor diharapkan tercipta sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim, termasuk dalam pencapaian target peningkatan status IDM 2021"

UJAR KEPALA DPMPD PROV. KALTIM
MOH. JAUHAR EFENDI





Selain itu, rakor bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendorong dan faktor penghambat untuk dijadikan perbaikan pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sinergitas rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2021 antar provinsi dan kabupaten kota.

Termasuk menyiapkan materi usulan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, verifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan bagi desa melalui bankeu provinsi.(DPMPD Kaltim/arf)

Pengelola BUMDes Paser Sarankan Provinsi Dorong Desa Alokasikan Proporsional Untuk Permodalan BUMDes



TANA PASER --Para pengelola BUMDes peserta Rapat Kerja Teknis (Rakertek) memberi masukan penting dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes.

Pemprov Kaltim didorong segera membuat aturan terkait penggunaan dana desa agar diarahkan memberikan porsi proporsional untuk permodalan BUMDes.

"Kita berharap ada semacam Surat Gubernur untuk mengatur itu. Sebab kecenderungan desa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik, permodalan sisanya," ujar Pengelola BUMDes Amanah, Tarno saat menyampaikan masukan pada Rakertek BUMDes se Kabupaten Paser, di Hotel Tiara Tana Paser, Senin (17/2).

Dia menilai tanpa dukungan permodalan memadai akan susah memajukan menjadi BUMDes sehat. Karenanya mereka sangat berharap bantuan keuangan bagi desa segera direalisasikan dengan harapan sebagiannya dialokasikan untuk permodalan BUMDes.

Termasuk diharapkan ada kebijakan yang dapat mengatur pemanfaatan dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Sejalan dengan itu, Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku akan mengkaji kemungkinannya. Sebab prioritas penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendes PDTT setiap tahunnya.

"Bila memungkinkannakan dibuat surat gubernur untuk bupati agar mengarahkan desa dapat mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes," pungkasnya. (DPMPD Kaltim/arf)

Provinsi Kalimantan Timur masih "merah" dalam pengelolaan SP4N-LAPOR

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR!, yang dihadiri oleh petugas teknis setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur, Kusharyanto, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Didy Rusdiansyah

“Provinsi Kalimantan Timur masih merah, karena masih banyak OPD yang tidak menanggapi aduan dari SP4N LAPOR!, operator harus sering sering kunjungi website, dan segera ditindaklanjuti” ujar Didy Rusdiansyah pada sambutannya.

Rapat evaluasi pengelolaan S4PN-LAPOR! Ini juga memberikan wadah bagi Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur untuk memberikan masukannya terkait pelayanan kepada masyarakat.

“

Laporan yang sudah disampaikan dan diterima, hendaknya direspon, agar tidak menimbulkan kekecewaan warga. Bukan hanya direspon, juga harus dikelola, ditindaklanjuti sampai selesai, bukti hadirnya negara di tengah masyarakat. Laporan yang tidak direspon, akan menjadi laporan Ombudsman.” Kata Kusharyanto.

Khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, ada satu aduan tertanggal 16 mei 2019, dan telah selesai di tindaklanjuti tertanggal 23 januari 2020. (Perencanaan Program)



Jauhar Sebut Pemprov Sudah Laksanakan Kewajiban Memastikan Warga Kaltim Aman Hadapi Kasus Corona

TANA PASER --Para pengelola BUMDes peserta Rapat Kerja Teknis (Rakertek) memberi masukan penting dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes.

Pemprov Kaltim didorong segera membuat aturan terkait penggunaan dana desa agar diarahkan memberikan porsi proporsional untuk permodalan BUMDes.

SAMARINDA -- Pemprov Kaltim disebut sudah melaksanakan kewajiban memastikan warga Kaltim aman dalam menghadapi kasus penyebaran Virus Corona yang terjadi di Wuhan, Tiongkok.

"Sejauh ini kita sudah melaksanakan kewajiban. Pemprov sudah berkoordinasi dengan Kemenkes RI memberikan layanan ruang isolasi di RSUD AWS Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD Panglima Sebaya Paser dan RSUD Taman Husada Bontang fasilitas jika ada suspect. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada," ujar Plt Asisten Pemerintah dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menjadi narasumber Dialog Publika TVRI Kaltim, Kamis (20/2).

Pun demikian terhadap warga Kaltim yang melanjutkan pendidikan tinggi di Tiongkok. Sebelum pemulangan ke Indonesia dan kembali ke Kaltim, Pemprov Kaltim melalui Badan Penghubung di Jakarta selalu berkoordinasi dengan Kemenkes RI terkait langkah-langkah evakuasi dan penanganan warga Indonesia di Tiongkok.

Karenanya saat pemulangan ke Kaltim langsung disambut Gubernur Kaltim, Isran Noor sebagai bentuk perhatian. Terkait kondisi ini, Jauhar menyarankan masyarakat boleh wasapada tapi tidak berlebihan.

Terlebih Pemerintah Indonesia sudah berpengalaman atasi flu burung dan penyebaran virus berbahaya lainnya.

"Saya ingatkan masyarakat jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Sebab jika tersebar informasi salah dikhawatirkan menyebabkan ekonomi melambat," serunya.
UJAR KEPALA DPMPD PROV. KALTIM MOH. JAUHAR EFENDI

Rusniah salah satu ibu Mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan perkuliahan di Tiongkok mengaku saat kejadian heboh Virus Corona sangat panik.

Hanya saja dia melihat kondisi anaknya aman karena sebelum pemulangan untuk observasi dan pemulangan ke Kaltim aktif menanyakan informasi kepada anaknya.

"Saya sering video call memastikan anak baik-baik saja. Dan tentunya terus memberikan motivasi dan doa agar tetap sehat," katanya.

Sementara Rizka Nurazizah Mahasiswa Kaltim yang kuliah di Tiongkok mengaku bersyukur tindakan cepat pemerintah. Sebab saat wabah virus corona Rizka bersama mahasiswa lain yang satu asrama harus membatasi berhubungan dengan orang luar asrama sebagai antisipasi.

"Sampai-sampai kita makan bubur karena menghindari kontak dengan orang luar sebelum mendapat pertolongan pemerintah," katanya.

Hanya saja dia menilai pemberitaan yang beredar di masyarakat terlihat berlebihan. Bahkan informasi di media sosial yang menayangkan ada warga Tiongkok berjatuh pingsan di jalan disebut merupakan berita bohong atau hoax.

Dia berharap kasus penyebaran virus corona bisa selesai agar segera bisa melanjutkan perkuliahannya. Untuk sementara dia tetap menempuh pendidikan dengan sistem pembelajaran online sampai kondisinya benar-benar aman.(DPMPD Kaltim/arf)



DI RUMAH SAJA

#YUKDIRUMAHSAJA



Jika merasa kurang sehat

Secara sukarela agar tinggal di rumah atau tidak bekerja, tidak sekolah atau ke tempat umum lainnya

KRITERIA KURANG SEHAT :



Demam



Gejala penyakit pernapasan lain



Batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas

yang harus dilakukan di rumah :



Selalu gunakan masker, ganti setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah tertutup, kemudian cuci tangan dengan benar



Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup



Upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter



Hindari pemakaian bersama alat makan (piring, sendok, garpu dan gelas). Cuci alat makan dengan air dan sabun



Tetap di rumah dan mudah di hubungi. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, serta hindari kerumunan atau keramaian



Jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan



Hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

MENJAGA JARAK

(SOCIAL DISTANCING)

Adalah **kondisi menjaga jarak dengan orang lain** agar tidak terjadi penularan



Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter

Jangan pergi ke tempat yang ramai, dan gunakan masker bila harus berada di keramaian



Tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting, (belajar di rumah, beribadah di rumah, bila mungkin berkerja di rumah).



Tidak salaman



Tidak kumpul-kumpul (ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian, dan lainnya)



#MulaiDariDesa

ODP
Orang dalam Pemantauan, orang dengan kategori ini sempat bepergian ke negara episentrum covid-19 atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona

PDP
Pasien dalam Pengawasan, yang menunjukkan gejala terjangkit covid-19

SUSPECT
Diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dengan orang yang positif corona

Kemendesa.1 Kemendesa pdtt KemenDesa Kemendespdtt Kemendesa.go.id

#MulaiDariDesa

POSITIF
Setelah melalui cek lab dan prosedur lain

LOCKDOWN
Mengunci masuk atau keluar dari suatu wilayah/ Daerah / Negara

SOCIAL DISTANCING
Menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang

Kemendesa.1 Kemendesa pdtt KemenDesa Kemendespdtt Kemendesa.go.id

Flyer ini bisa diunduh di :
<http://www.kemendesa.go.id/>



#MulaiDariDesa




SEGERA GANTI PAKAIANMU


Sesampainya di rumah

Lindungi keluarga dirumah dengan cara :




PUTUSKAN RANTAI PENULARAN COVID-19
"Bersama Kita Bisa"

 Kemendesa.1

 Kemendesa pdtt

 KemenDesa

 Kemendespdtt

 Kemendesa.go.id

Flyer ini bisa diunduh di :
<http://www.kemendesa.go.id/>



Gubernur Isran Harap Percepatan Penyaluran Dana Desa Bisa Diwujudkan di Kaltim

SAMARINDA -- Gubernur Kaltim, Isran Noor berharap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020 benar-benar dapat mewujudkan percepatan penyaluran dana desa di Kaltim

"Tentunya tidak hanya urusan bisa cepat, tapi cepat yang berkualitas. Cepat salur dengan tanpa melanggar ketentuan dan ada hasil atau outcome yang nyata dari penyalurannya," harap Gubernur Isran saat membuka raker, di Ballroom Hotel Mesra Samarinda, Selasa (25/2).

Menurutnya percepatan perlu dilakukan sebagai bentuk menjawab tuntutan masyarakat. Sebab pemerintah idealnya harus berpacu dengan harapan masyarakat maupun harapan pemerintah sendiri dalam memberikan pelayanan maksimal.

Meskipun diakui penyaluran dana desa di 841 desa se Kaltim sangat baik. Pada 2019 misalnya, tercatat penyalurannya mencapai 99 persen lebih, sisanya karena ada empat desa yang tersangkut masalah hukum yang belum ditindaklanjuti.

Karenanya dia juga berharap dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal membangun desa dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Jangan sampai ada dana desa yang disalahgunakan atau dikorupsi. Korupsi, kata dia tidak hanya terjadi karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan.

"Meskipun bisa jadi penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan. Makanya kepolisian dan kejaksaan diharap ikut membimbing. Kalau ada masalah yang tidak perlu diproses jangan diproses hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, gubernur berharap semua pihak terkait ikut menyukseskan penyaluran dan penggunaan dana desa. Utamanya bupati dan camat yang memang punya tanggung jawab pembinaan dan pengawasan.

"Sebab kita patut bersyukur dengan ada dana desa. Meningkatkan kehidupan semakin membaik. Makanya harus dimanfaatkan secara optimal," tegasnya.

Terlebih mekanisme pengelolaannya bagus, yakni dana dikelola daerah bukan di pusat. Mengingat dana pembangunan hanya 35 persen ke daerah dan 65 persen ke pusat.

Padahal pusat hanya urusi hankam, keuangan, peradilan, agama, dan luar negeri. Selebihnya pembangunan dan urusan dalam negeri ada di daerah.

"Saya bermimpi kita seperti China 70 persen dana pembangunan ditransfer ke daerah agar pembangunan bisa semakin pesat," akunya.

Raker dibuka Gubernur Isran dengan ditandai pemukulan gong dengan didampingi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani, Kasub Direktorat Fasilitas Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri Deddy Wanarman, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim Midden Sihombing, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Desa PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Adil Hamonangan, Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Jenderal Kemendagri Toyadi, dan Kepala DPMPD Kaltim Moh Jauhar Efendi. (DPMPD Kaltim/arf)



BBPB Binuang – DPMPD Kaltim Teken MoU Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian

SAMARINDA – Balai Besar Pertanian Binuang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terkait kerjasama pemberdayaan masyarakat bidang pertanian.

Penandatanganan MoU dilakukan Kepala BBPB Binuang, Yulia Asti Kurniawati dengan Kepala DPMPD Kaltim yang diwakili Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini, di Hotel MJ Samarinda, Jumat (28/2) siang.

Dikatakan Esthi yang didampingi Kasi Pembangunan Informasi Desa dan Kelurahan, Isnawati, penandatangan MoU dalam rangka kerjasama dan dukungan pelaksanaan program kegiatan BBPP Binuang Tahun Anggaran 2020. Karenanya sebelum dilakukan penandatanganan MoU dilakukan sosialisasi dan konsolidasi program BBPP Binuang Tahun 2020 untuk wilayah Kaltim dan Kaltara.

BBPP Binuang mengundang instansi terkait lingkup Kaltim dan Kaltara seperti DPMPD, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian, Perusahaan Perkebunan Sawit, dan Bank Indonesia mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tersebut.

Harapannya bisa terbangun sinergitas program BBPP Binuang dengan OPD lingkup Kaltim dan Kaltara, khususnya DPMPD Kaltim terkait pemberdayaan masyarakat bidang pertanian.

“Ini langkah awal. Semoga MoU bisa ditingkatkan menjadi perjanjian kerjasama (PKs) mendukung pengembangan pertanian di Kaltim, khususnya di desa-desa yang memiliki potensi pertanian,” ujarnya.(DPMPD Kaltim/arf)



Penting Kaderisasi Masyarakat Desa Jadi KPMD

KOTABANGUN – Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan individu-individu yang dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan kerja pemberdayaan di kemudian hari. Oleh karenanya, kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapan warga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi dalam sambutan yang disampaikan Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy, Isnaini saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi KPMD, di Balai Desa Liang Ulu, Kecamatan Kotabangun, Senin (2/3).

Menurutnya, KPMD merupakan pendamping desa yang dipilih dari warga desa setempat, untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri.

Dalam ketentuan PP Desa maupun Permendesa disebutkan bahwa KPMD dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepada Desa.

Dalam konteks pendampingan Desa, KPMD sebagai kader skala lokal Desa bukan menjadi bawahan dari “suprastruktur” Pelaku Pendampingan berjenjang baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat dan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

“KPMD adalah sub sistem dari pendampingan Desa secara keseluruhan namun bergerak di lingkup kewenangan skala lokal Desa,” katanya.

Salah satu tugas pendamping desa yaitu untuk memperkuat proses kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dengan tidak tertutup peluang untuk melakukan kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya

Legalitas KPMD tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 9 Permendesa PDTT No. 18/2019 tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat. Pasal tersebut menetapkan bahwa pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas tenaga pendamping profesional, KPMD, dan pihak ketiga.

Prinsip pembangunan yang dimanahkan dalam UU Desa yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Dua hal ini adalah saling mendukung satu dengan yang lain. Harus dipahami bahwa dengan adanya UU Desa, desa tidak serta merta harus membangun desanya sendiri tanpa dukungan pihak lain. Desa harus didukung oleh semua sektor agar lebih cepat berhasil.

“Melalui forum ini juga saya harapkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan UU Desa baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta unsur lainnya dapat bersatu padu, bekerjasama dan bergotong-royong untuk mewujudkan Desa Membangun. Hindari tumpang tindih dan jauhi ego sektoral yang masih ada. Perkuat koordinasi, tingkatkan sinkronisasi dan kembangkan harmonisasi,” katanya.



Hanya dengan cara inilah kita dapat mewujudkan cita-cita membangun dari pinggiran untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Mari kita bergotong royong membangun Indonesia dari desa,” serunya.

Sementara Ketua Panitia, Helvin Syahrudin menyebut pelatihan meningkatkan kapasitas peran dan KPMD dalam melakukan pendampingan Implementasi UU Desa, meningkatnya keterlibatan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat, serta sebagai media sarana komunikasi dan alih informasi tentang eksistensi dan perkembangan terkini mengenai Kebijakan Pembangunan Desa.

Kegiatan diikuti 46 orang peserta yang terdiri dari KPMD 15 Org, Perwakilan Staf Kecamatan 3 Org, Perwakilan Aparatur Desa se Kecamatan Kota Bangun 21 Org, Tenaga Pendamping Desa Kota Bangun 8 Org.

Perlu diketahui bahwa jumlah KPMD dari 841 total Desa, baru terbentuk sebanyak 255 KPMD, khusus untuk Desa se Kecamatan Kota Bangun dari 21 Desa baru terbentuk sebanyak 15 Orang yang tersebar di 3 Desa yaitu Desa Kota Bangun Ulu, Desa Sarinadi dan Desa Muhuran.

Sementara di 18 Desa lainnya belum terbentuk, melalui pertemuan ini diharapkan Kepala Desa sepulang dari kegiatan ini dapat segera membentuk dan melegalkan KPMD sebagai pendamping asli yang dimiliki Desa,”katanya.(DPMPD Kaltim/arf)

Jauhar : Usai Dilantik Harus Amanah Dalam Jabatannya

SAMARINDA – Sebanyak 299 orang pejabat administrasi (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Gubernur Kaltim, di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/3) siang.

Lima orang diantaranya pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim yang mutasi vertikal dan mutasi horizontal.

Mulai dari Drs. Elvis, M.Si dari Kasi Pembangunan Desa menjadi Kabid UEM, SDA, dan TTG, Isnawati S.P., M.Si dari Kasi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan menjadi Kasi Pembangunan Desa, Drs. Akhmad Najhani Staf Bidang Pemdeskel menjadi Kasi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan, Aryono Dharma Putra, S. Hut dari Staf Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menjadi Kasi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Kaltim, dan Noor Agustina, S.T Plt Kasi Sarana Prasarana menjadi pejabat definitif.

“Yang menerima undangan diucapkan selamat. Mutasi dilakukan dalam rangka mengisi kebutuhan organisasi. Usai dilantik harus amanah dalam jabatan,” ujar Kepala DPMPD Kaltim, Jauhar Efendi saat menghadiri Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Kaltim

Lebih lanjut, dia menyebut kalau bicara jabatan maka itu adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan. Maka bagi mereka yang belum berkesempatan tidak perlu mengira-ngira.

Dia pun mengaku sudah pernah mengalami ada SK pengangkatan pada satu jabatan kemudian tidak jadi dilantik dan diisi orang lain. Agar tidak kecewa harus menganggap jabatan adalah kepercayaan dan sudah digariskan.

“Maka tidak ada satu orangpun bisa menghalangi jika sudah waktunya,”katanya

Karenanya dia mengajak semua menyukuri yang apa yang sudah diberikan. Dimanapun ditugaskan harus siap memberikan pengabdian terbaik.

“Saya akan bangga jika ada alumni DPMPD bertugas di dinas lain diakui disiplin dan berkinerja baik. Makanya harus mampu memegang nama baik diri sendiri dan organisasi,”tegasnya.(DPMPD Kaltim/arf)



Melalui Siaran TVRI, Jauhar Minta Dana Desa Fokus Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi kembali mengingatkan desa untuk menetapkan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas penggunaannya, yakni untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

“Jika sejak awal Dana Desa dikucurkan desa lebih fokus membangun infrastruktur, kedepan sudah harus berubah fokus untuk pemberdayaan masyarakat. Makanya melalui siaran TVRI ini kembali diingatkan agar Dana Desa tahun 2020 diarahkan sektor pemberdayaan masyarakat,” seru Jauhar saat menjadi narasumber dialog TVRI Kaltim, Selasa (3/3).



Khusus untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat dapat digunakan untuk mengembangkan unit usaha maupun skala usaha BUMDes.

Menurutnya, Dana Desa dikucurkan tidak lain ingin mendorong laju pembangunan desa dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Gilirannya diharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada kesempatan itu Jauhar juga menyampaikan informasi terkait Permendes PDTT No11/2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang membaginya dalam tiga tahap, yakni tahap I 40 persen (Januari-Juni), tahap II 40 persen (Maret-Agustus), dan tahap III 20 persen (Juli-Desember) untuk reguler.

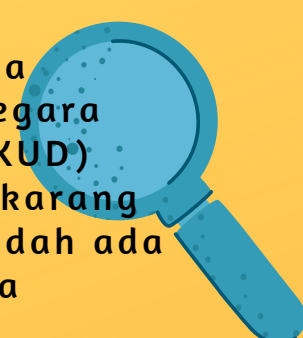
Khusus untuk Desa Mandiri penyalurannya dibagi dalam dua tahap, yakni 60 persen tahap I (Januari-Agustus) dan 40 persen tahap II (Juli- Desember).

Kemudian PMK No205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa yang merubah mekanisme penyaluran Dana Desa dari tahun-tahun sebelumnya sejak Dana Desa dikucurkan sejak 2015.

Sementara Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unmul Samarinda, Iman Surya menyebut kucuran Dana Deaa diharap pada saatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

"Intinya bagaimana bisa memberi manfaat. Pembangunan yang dilakukan memang tidak memberi manfaat langsung, tapi memberi daya ungkit ekonomi masyarakat," kata Iman.

"Jika sebelumnya penyaluran Dana Desa mekanismenya dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum masuk Rekening Kas Desa (RKD), sekarang dari RKUN langsung masuk ke RKD asalkan sudah ada pergub pemindahbukuan dan sudah ada APBDesnya,"sebutnya.



Sedangkan terkait alokasi dan besaran Dana Desa Kaltim sejak 2015-2020 mencapai Rp3.986.745.634.000,- untuk 841 desa se Kaltim. Rinciannya Rp240.542.413.000,- tahun 2015, Rp300.216.745.000,- tahun 2016, Rp540.759.158.000,- tahun 2017, Rp731.009.055.000,- tahun 2018, Rp870.119.582.000,- tahun 2019, dan Rp911.976.179.000,- tahun 2020. "Besarnya terus meningkat dari tahun ke tahun," katanya.

Hasilnya, sudah berhasil membangun 2.396 km jalan desa, 78.671 km jembatan, 298.872 m drainase, 1.239 unit penahan tanah, 1.333 unit tambatan prahu, dan 3.070 unit air bersih.

Kemudian 314 unit irigasi, 751 unit/kegiatan PAUD, 99 unit Polindes, 163 unit/kegiatan BUMDes, 913 unit raga desa, 135 unit pasar desa, 825 unit MCK, 375 unit Posyandu, 84 unit embung, dan 548 unit sumur.

Sebagai contoh membangun jalan desa, itu tidak bisa secara langsung menggerakkan ekonomi, tapi keberadaannya memudahkan akses jalan sehingga memangkas waktu tempuh dan membuat kendaraan cepat rusak.

Tentu pada saatnya bernilai ekonomi bagi masyarakat desa. Yang merasakan langsung manfaatnya adalah masyarakat yang mengusulkan.

Meski begitu, dia berharap desa memberikan porsi proporsional untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Menurutnya jika masyarakat berdaya dan kuakitas SDM nya bagus akan mengurangi laju urbanisasi masyarakat desa ke kota.

Masyarakat desa akan lebih punya semangat membangun desanya ketimbang bekerja ke kota.(DPMPD Kaltim/arf)

Kaltim Coba Yakinkan Pentingnya Keberpihakan Pusat Terhadap Lokasi Pemindahan IKN

SURABAYA -- Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mencoba meyakinkan pemerintah pusat terkait pentingnya keberpihakan terhadap Kaltim sebagai lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi menilai perlu ada porsi anggaran memadai untuk menyiapkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kaltim menyongsong pemindahan IKN.

"Saya mencoba menyakinkan kondisi Kaltim saat ini, terutama terkait Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih rata-rata berkembang dan masih menyisakan PR jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal cukup banyak. Serta masih dihadapinya sejumlah permasalahan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama," ujar Jauhar saat menyampaikan informasi terkait keikut sertaannya pada Rakortekrenbang Regional I, di Surabaya, Kamis (5/3).

DPMPD sendiri masuk desk 27. Pembahasan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadwal pembahasan urusan sebenarnya hanya 90 menit. Tetapi karena dia berhasil meyakinkan pentingnya keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Kaltim sebagai calon Ibukota Negara (IKN), maka pembahasan baru selesai hampir 2 jam.

Pada forum sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah tersbut, tidak ketinggalan disampaikan persoalan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Demikian juga masalah aset desa.

Karena keterbatasan waktu, pembahasan soal konvergensi stunting, desa digital tidak sempat dibahas. Jadwal selanjutnya Provinsi Kaltara sudah menunggu. Maka usulan kedua hal tersebut langsung dimasukkan lewat Tim Desk 27.

Menariknya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ingin memetakan jumlah BUMDes dengan katagori berkembang dan maju, tetapi hingga pelaksanaan Rakor tadi belum bisa menyampaikan variabel maupun indikator untuk mengelompokkan BUMDes ke dalam dua katagori tersebut.

Hanya bisa disampaikan bahwa target nasional BUMDes dengan status Berkembang pada tahun 2021 sebanyak 1.000 BUMDes. Sedangkan katagori maju sebanyak 250 BUMDes.



"Terhadap persoalan tersebut, saya mengusulkan agar segera dilakukan rapat pembahasan tentang kriteria BUMDes Maju dan BUMDes Berkembang. Tentu saja saya meminta agar melibatkan utusan daerah, agar tidak terjadi bias dalam pengambilan keputusan," sebutnya.

Dari Kemendagri meminta kepada Pemprov. Kaltim untuk menyiapkan dukungan penganggaran dalam rangka konsolidasi peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

"Terhadap usulan ini, saya memberanikan diri untuk menyanggupi. Semoga Allah memudahkan urusan untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa. Tentu saja sinergitas dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan untuk menyukseskan kerja besar ini, agar desa-desa di Kaltim semakin maju, mandiri dan sejahtera," pungkasnya.

Rakortekrenbang Regional I diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Ada 18 provinsi yang masuk wilayah Regional I. Yaitu Prov. Jatim, NTB, NTT, 5 provinsi di Pulau Kalimantan, 6 provinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Jauhar hadir ditemani Sekretaris, Kasubbag Rengram, Kasubbag Keuangan dan staf Rengram DPMPD Kaltim beserta tim BAPPEDA Kaltim mengikuti kegiatan Rakortekrenbang 2020.(DPMPD Kaltim/MJE/arf)

DPMPD Berguru Masalah Pembentukan dan Pelestarian MHA di Bali

BALI –Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Tujuannya untuk berguru atau studi pembelajaran tentang program pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat khususnya mengenai pembentukan dan pelestarian masyarakat hukum adat (MHA).

Adapun maksud studi pembelajaran ke Provinsi Bali antara lain mencari persamaan persepsi tentang kebijakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelembagaan masyarakat desa dan mencari informasi tentang kebijakan Pemprov Bali tentang pembentukan, pelestarian dan perlindungan masyarakat adat di Bali.

Sedangkan Tujuan diadakan Pembelajaran ini mendapatkan pola atau contoh program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Bali dalam melakukan pembinaan dan penataan MHA di Bali, meningkatkan pemahaman dalam melakukan pembinaan dan pembentukan MHA

Kemudian melihat langsung kondisi masyarakat adat di Provinsi Bali, diantaranya Desa Ubud, Desa Renon, Desa Tuban dan Desa Jimbaran. Mengingat di bali terdapat sebanyak 1.493 desa adat yang tersebar di 636 desa, 80 kelurahan, 57 kecamatan, 8 kabupaten dan 1 kota..

“Semoga dengan kunjungan kami ke Provinsi Bali kali ini , kami mendapatkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat untuk mewujudkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Timur melalui program pemberdayaan masyarakat,” ujar Jauhar dihadapan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan kepala desa terkait saat melakukan kunjungan kerja, di Bali, Rabu (11/3).

Menurutnya Provinsi Kaltim memiliki 841 Desa dan 197 Kelurahan yang tersebar di 103 kecamatan dan di 7 Kabupaten 3 Kota. Dalam pengaturan MHA, saat ini Pemprov Kaltim telah memiliki produk hukum tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015).

“Berdasarkan hasil identifikasi kami, keberadaan MHA di Kaltim sebanyak 27 MHA, sementara hingga saat ini baru 2 Desa yang telah memiliki kekuatan Hukum melalui Peraturan Bupati Kabupaten Paser. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengharapkan bantuan dan memberikan masukan tentang masukan tentang pembentukan dan pelestarian MHA,” harapnya

Rombongan DPMPD yang melakukan kunjungan kerja mendamping Jauhar, Kabid Pemberdayaan kelembagaan dan Sosbudmasy, Isniani Trikorawati, Kasi Ketahanan Sosbudmasy, Huzaimah, beserta staf, beserta perwakilan DPMD Mahakam Ulu, DPMD Paser, DPMD Berau, dan DPMD Penajam Paser Utara

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali, Dewa Made Ardana, Pengurus Majelis Desa Adat sebagai Baga / Bidang Hukum Desa Adat, Dewa Rai Asmarajaya, dan Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dukcapil Bali, Ngurah Arya.

Bakal Direalisasikan, Rencana Program Pemasangan Internet Desa

SAMARINDA – Program pemasangan internet desa yang direncanakan Diskominfo Kaltim bakal direalisasikan. Dalam waktu dekat, Tim Diskominfo akan melakukan survey lapangan memastikan titik koordinat lokasi pemasangan perangkat internet desa.

“Kemarin Tim Diskominfo Kaltim berkunjung. Menindaklanjuti hasil rapat kordinasi tentang rencana pemasangan internet desa,” ujar Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi melalui Kepala Seksi Pembangunan Desa, Isnawati, Rabu (11/3).

Dia yang didampingi dua Kepala Seksi lainnya Akhmad Nahjani dan Esthi Susila Rini tersebut mengaku akan melibatkan Tim DPMPD Kaltim untuk mendampingi survey lapangan mengunjungi desa sasaran target pemasangan internet desa.

Termasuk informasi Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) setempat untuk membantu koordinasi dengan pihak pemerintah desa.

Menurutnya, ada tiga desa yang akan dipasang internet desa pada tahun 2020. Tiga desa tersebut ditetapkan Diskominfo menyesuaikan kriteria yang dibutuhkan dari lima desa yang diusulkan.

“Tiga desa tersebut Desa Laken Bilem, Yuatan, Kabupaten Kutai Barat dan Desa Muara Bengalon, Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang sudah ditetapkan. Untuk wilayah Kutai Kartanegara antara Desa Sidomulyo, Tabang atau Desa Selerong, Sebulu tergantung kondisi di lapangan hasil survey mendatang,” sebutnya.

Survey lokasi akan di awali wilayah kabupaten Kutai Timur. Kemudian secara bertahap dilanjutkan ke Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Seperti diketahui, desa yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan tersebut didorong harus mampu menjadi desa digital memanfaatkan kemajuan TIK sebagai penunjang kemajuan desa

“Kalau sudah ada internet akan kita dorong jadi desa digital agar bisa memberikan pelayanan dan promosi potensi desa berbasis internet,”ujarnya.



Menurutnya, Presiden Jokowi saat Rakornas P3MD mengingatkan agar desa-desa bisa menjadi desa digital dan desa wisata. Tentunya pemasangan akses internet desa diharap mendukung desa lokus menjadi desa digital maupun desa wisata.

Dia berharap keberadaan akses internet desa menunjang perangkat desa menggunakan layanan urusan pemerintah desa. Sebab sebagian layanan urusan pemerintahan desa sudah berbasis aplikasi dan harus terhubung jaringan internet.

Selain itu, desa juga dapat memanfaatkan mempromosikan potensi desa yang dapat dijual. Sebagai contoh produk unggulan BUMDes maupun potensi wisata yang akan dijual bisa dipromosikan melalui website resmi desa maupun jejaring sosial.(DPMPD Kaltim/arf)



DPMPD Lihat Potensi Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Penajam

PENAJAM -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengunjungi beberapa desa di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kunjungan tersebut untuk melihat potensi pengembangan pembangunan kawasan perdesaan empat desa di Kecamatan Penajam, yakni Desa Girimukti, Giripurwa, Sidorejo, dan Bukit Subur.

Diantaranya Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Riani Tisnadewi melalui Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini melakukan kunjungan ke Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Jumat (13/3).

Kunjungan didampingi Kasi Usaha Pemberdayaan Kelembagaan, SDA, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan DPMD PPU, Abimanyu.

Esthi menegaskan akan berkoordinasi dengan DPMD PPU mengembangkan kerjasama antar desa. Terlebih DPMD PPU sudah menetapkan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan di kecamatan-kecamatan se Kabupaten PPU.

Kecamatan Penajam ditetapkan sebagai kawasan agropastoral pertanian terpadu. Mengembangkan potensi yang ada di masing-masing desa seperti pertanian, peternakan, dan lainnya.

Selanjutnya Kecamatan Babulu yang terdiri dari Desa Summersari, Sri Raharja, Rawa Mulya, dan Sebakung Jaya sebagai Kawasan Agromina Pastoral Babulu

Kecamatan Babulu yang terdiri dari Desa Gunung Intan, Gunung Mulia, Gunung Makmur, dan Babulu Darat sebagai Kawasan Agropolitan.

Kecamatan Babulu terdiri dari Desa Waru, Babulu Laut, Labangka, dan Api-api sebagai Kawasan Minapolitan.

Terakhir Kecamatan Waru terdiri dari Desa Bangun Mulyo, Sesulu, Api-api, dan Waru sebagai Kawasan Ekonomi Ekowisata Waru

Setelah ini, dia mendorong desa segera membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai langkah awal membangun kerjasama antar desa. "Pada saatnya berusaha bersama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma)," sebutnya





Sementara Abimanyu menargetkan paling lambat bulan ini membentuk BKAD Kawasan Agropastoral Pertanian Terpadu Penajam.

Akan tetapi sebelumnya diawali diskusi melibatkan desa-desa terkait. Ini agar usulan kerjasama kawasan tidak hanya usulan dari atas, tapi juga dari bawah.

"Apakah pas kawasan yang akan dibangun yang akan menyasar pertanian, peternakan dan lainnya," sebutnya.

Sebagai penunjang, DPMD PPU sudah menetapkan 12 kegiatan yang menyasar pembangunan kawasan perdesaan.

Diantaranya sosialisasi pembentukan tim, merumuskan mekanisme pelaksanaan kegiatan fasilitasi percepatan pembangunan kawasan pedesaan, dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi percepatan pembangunan kawasan pedesaan.

Selanjutnya sosialisasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, pelaksanaan FGD tingkat kabupaten, melaksanakan koordinasi terkait penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, supervisi monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kawasan, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan. (DPMPD Kaltim/arf)

DPMPD Batalan Dua Kegiatan Libatkan Masyarakat Desa

SAMARINDA – Kebijakan Pemprov Kaltim memberlakukan local lockdown pada aktivitas yang melibatkan banyak orang diberlakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.

Dua kegiatan yang melibatkan masyarakat desa terpaksa harus dibatalkan sehari sebelum jadwal pelaksanaannya, yakni Senin 16 Maret 2020 pasca ditetapkannya kebijakan tersebut oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim

“Ini sifatnya kebijakan. Jadi kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan pimpinan demi kebaikan bersama. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kaltim,” aku Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menemui peserta pelatihan aparatur desa dan badan pemusyawaratan desa se Kaltim, di Harris Hotel Samarinda, Selasa (17/3) pagi.

Menurutnya dia sengaja menemui para peserta pelatihan untuk menyampaikan permohonan maaf dan menginformasikan kepada peserta yang sudah terlanjur datang perihal pembatalan pelaksanaan pelatihan.

Pada kesempatan itu, Jauhar juga meminta peserta untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan diri beserta keluarga. Termasuk mengajak masyarakat di desa masing-masing untuk waspada terhadap penyebaran covid-19 dengan menjaga kebersihan dan stamina tubuh.

Selain membatalkan pelatihan dimaksud, DPMPD Kaltim juga hari ini membatalkan rencana melakukan perjalanan darat menuju Kabupaten Berau mempersiapkan pelaksanaan Dialog Interaktif Kiprah Desa di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada 19 Maret 2020.

“Seyogyanya tim akan berangkat ba,da zuhur ini, tapi kita putuskan dibatalkan karena kegiatan akan melibatkan banyak orang masyarakat desa setempat. Sementara kebijakan local lockdown terhadap berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, baik pertemuan dan kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan,” sebutnya.

Kegiatan Kiprah Desa akan kembali diagendakan setelah kebijakan lockdown dicabut Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Untuk diketahui, Pemprov Kaltim memutuskan akan memberlakukan local lockdown terhadap aktivitas yang melibatkan banyak orang. Local lockdown dimulai sejak Selasa, 17 Maret 2020 selama 14 hari kedepan.

Itu merujuk hasil Rakor Covid-19 di Ruang Malinau Hotel Gran Senyur Balikpapan, Senin Tanggal 16 Maret 2020 Pemprov Kaltim memutuskan local lockdown harus diambil Pemprov Kaltim terhadap berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, baik pertemuan dan kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan

Meski demikian sifatnya tidak full atau total. Seperti dijelaskan Wagub Hadi Mulyadi pada rakor tersebut bahwa orang masih bisa keluar dan masuk Kaltim namun dengan pengawasan / pemantauan yang ketat.

Karenanya pemerintah dan pihak berwenang meminta masyarakat membatasi bahkan mengurangi semaksimal dan seefektif mungkin aktifitas di luar dan berhubungan banyak orang.

Seperti anak-anak sekolah juga mahasiswa diliburkan, termasuk kegiatan pegawai di kantor-kantor yang tidak terlalu penting, bisa dilakukan di rumah.

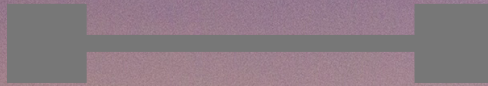
Untuk anak sekolah, Pemprov Kaltim meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk meliburkan selama 14 hari kedepan. Termasuk menunda ujian nasional hingga dalam waktu yang belum ditentukan

Rakor Covid-19 sendiri diikuti Gubernur Kaltim Isran Noor, Wagub Hadi Mulyadi, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto dan Kapolda Irjen Pol Muktiono. Kemudian Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Hasanuddin Mas'ud, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Walikota Bontang Hj Neni Moerniaeni, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Dinas/OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim, Kepala bandara dan Kepala pelabuhan se Kaltim, Direktur RSUD AWS Samarinda dan Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.(DPMPD Kaltim/arf)





Alamat



JLN. MT. HARYONO NO 96 A
TELP (0541) 7779725
FAX. (0541) 7779726

Sosial Media Kami di :



www.dpmpd.kaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



@dpmpd_kaltim



DPMPD Kaltim